

Judul : PPPK akan diangkat jadi penuh waktu, DPR minta Pemda setop pengangkatan staf baru
Tanggal : Jumat, 21 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

PPPK Akan Diangkat Jadi Penuh Waktu DPR Minta Pemda Setop Pengangkatan Staf Baru

Senayan mendukung langkah Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melarang Pemerintah Daerah (Pemda) menambah staf baru. Larangan ini menyusul keputusan Pemerintah Pusat (Pempus) yang akan mengangkat guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi penuh waktu pada tahun 2027.

WAKIL Ketua Komisi II DPR Bahtra Banong mengatakan, ada fenomena yang sering terjadi di daerah. Kepala daerah terpilih sering kali mengakomodir tim sukses (timses) mereka untuk masuk ke dalam jajaran pemerintahan sebagai tenaga honorer. Hal ini menjadi masalah serius karena belum adanya regulasi ketat yang membatasi praktik tersebut.

Sehingga, kepala daerah merekrut tim suksesnya menjadi staf sebanyak-banyaknya. "Jika praktik pengangkatan staf honorer tanpa kontrol ini terus berlanjut, maka beban fiskal daerah akan semakin membengkak," kata Bahtra di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Sebelumnya, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto akan melakukan

sosialisasi terkait tidak adanya perekrutan staf baru oleh kepala daerah. "Kemendagri akan turun untuk mengawal dan memastikan kepala daerah tidak lagi merekrut staf-staf baru dan semuanya disesuaikan dengan tahapan yang disepakati berdasarkan rapat pada hari ini," ujar Bima di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (18/8/2026).

Bima mengatakan, selama ini ada dua hal yang selalu menjadi harapan kepala daerah kepada Pempus. Pertama, memberikan bantuan kapasitas fiskal untuk pembayaran pegawai. Kedua, alih status PPPK dari paruh waktu ke penuh waktu, kemudian penuh waktu menjadi ASN.

Bahtra melanjutkan, pembatasan rekrutmen tenaga honorer perlu dibatasi secara ketat. "Kemendagri sudah mengeluarkan



Bahtra Banong

kan surat edaran tidak boleh lagi ada perekrutan tenaga honorer atau pengangkatan staf-staf yang dianggap bisa membebani fiskal daerah," ucapnya.

Bahtra mengingatkan para kepala daerah untuk memperhatikan kesehatan anggaran daerah. Pasalnya, saat ini banyak daerah yang belanja pegawainya sudah melampaui batas kewajaran atau lebih dari 50 hingga 60 persen.

"Kita mendorong supaya ini tidak bertambah terus dan tidak melebihi daripada aturan yang ditetapkan maksimal 30 persen (dari APBD,"

kata politisi Gerindra ini.

Bahtra mengatakan, Pempus telah mengakomodasi aspirasi para PPPK paruh waktu akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Keputusan ini menjawab kekhawatiran mengenai nasib PPPK yang sebelumnya akan dirumahkan. "Guru-guru PPPK akan ditanggung oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Mereka juga berpeluang menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN)," ucapnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi X DPR My Esti Wijayati meminta Pemerintah memperkuat alokasi Transfer ke Daerah (TKD) untuk sektor pendidikan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2027. Penguatan ini mendesak agar Pemda memiliki kemampuan fiskal yang memadai, terutama untuk menjamin penghasilan guru PPPK paruh waktu.

"Pekerjaan Rumah (PR) besar kita saat ini adalah gaji PPPK paruh waktu masih banyak di bawah Rp 1 juta karena bergantung pada kemampuan fiskal masing-masing daerah," ujar My Esti di Jakarta, Rabu (19/8/2026).

Untuk itu, My Esti mendesak Pemerintah agar tidak memotong anggaran TKD sektor pendidikan. Sebaliknya, alokasi tersebut perlu ditingkatkan agar Pemda mampu menjalankan kewajibannya secara optimal. "Kalau TKD pendidikannya tidak ditambahkan, daerah tidak akan pernah mampu menyelesaikan PR yang ada," tegas politisi PDIP ini.

My Esti menambahkan, penguatan TKD pendidikan tidak hanya berfokus pada kesejahteraan guru, tetapi juga untuk mengatasi berbagai persoalan mendasar di daerah. Yakni pemenuhan dan perbaikan sarana-prasarana sekolah, pemerataan akses dan pembiayaan operasional pendidikan di daerah terpencil, serta peningkatan kualitas fasilitas penunjang belajar-mengajar.

Dia meminta agar pemenuhan gaji guru yang layak direncanakan secara pasti sejak awal penyusunan anggaran, bukan mengandalkan kemungkinan adanya dana tambahan di tengah jalan. "Jangan lagi menggunakan kalimat 'semoga ada,'" cetus legislator asal Daerah Istimwa Yogyakarta (DIY) ini. ■ TIF